

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.P Parlindungan, 1989, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Pendaftaran Tanah Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2003, *Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Majalah Renvoi, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Dualism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kesembilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farida, Maria, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta.
- Farida, Maria, 2007, *Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke sembilan, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- HS, Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta PPAT*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ruchiyat, Edi, 1989, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah UUPA*, Amico, Bandung.
- HS, Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Samsaimun, 2018, *Peraturan Jabatan PPAT Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan Hak atas Tanah di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surajiyo, 2015, *Dasar-Dasar Logika*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sulihandari, Hartanti, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- S. Suria Sumantri, Jujun, 2003, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta.
- S.W. Sumardjono, Maria, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yudara, N.G, 2001, *Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Tertulis yang Autentik*, Makalah, Jakarta.

## **B. Jurnal/Artikel/Tesis**

- Akbar, Firdaus, "Implementasi Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Satu Wilayah Provinsi", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021.

Attamimi,A.Hamid S, “Peranan Keputusan Presiden Republic In Donesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, *Disertasi*, Fakultas Hukum, Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.

Jabadi, Karolina, “Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Daerah Kerja PPAT di Wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta Berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, 2017.

Gorali Syahputra Hasibuan , “Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Daerah Kerja Provinsi Berdasarkan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Gustari,Revol,“Tinjauan Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum”, *Jurnal*, Universitas Ekasakti Padang, 2021.

Ridgeky dkk, “Efektivitas Implementasi Daerah Kerja PPAT Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2018.

Suharyono, “Legal Assurance And Legal Protection In Land Registration In Indonesia”,*Jurnal* , Sriwijaya Law Review, Vol.3, No: 1, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah/ UUHT (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632);

Undang-Undang Nomor Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Rancangan Undang-Undang Jabatan Pembuat Akta Tanah.

#### **D. Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, [https://kbbi.web.id/wilayah kerja](https://kbbi.web.id/wilayah_kerja), diakses pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 23.47 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tinjauan>, diakses pada tanggal 5 Mei 2022, pukul 11.43 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kendala>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022 Pukul 21.31 WIB.

Alfarizy, Shallman, "Mengenal Pejabat Pembuat Akta Tanah", <https://shallmanalfarizy.com/2016/11/mengenal-pejabat-pembuat-akta-tanahppat/> diakses pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 13.16 WIB.

Firdaus, Rizky, "Pengertian Yuridis", dimuat dalam <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> diakses pada tanggal 4 Mei 2022, pukul 19.51 WIB.

Putra, Nanda Narendra, "Potensi Masalah Bagi PPAT Akibat Perluasan Wilayah Kerja", <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-potensi->

masalah-bagi-ppat-akibat-perluasan-wilayah-kerja-lt57878568c57bd  
diakses tanggal 24 Juni 2022 pukul 22.02 WIB.

Sofyan, Syafran, “IPPAT Pertimbangkan Layangkan Uji Materiil PP No. 24 Tahun 2016”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5788de49bfe08/i-ppatpertimbangkan-layangkan-uji-materiil-pp-no-24-tahun-2016>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 10.30 WIB.

Widyati, Rully, “Delapan Pokok Deregulasi Investasi Agraria”, <https://bisnis.temo.co/amp/707945/delapan-pokok-deregulasi-investasi-agraria>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB

#### **E. Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yogyakarta Heri Sabto Widodo SH, pada tanggal 21 Juni 2022 Pukul 13.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Dosen Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada pada tanggal 13 Juni Pukul 14.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Eti Yuli Hartati, S.H sebagai Penata Muda di bidang Penetapan Hak dan pendaftaran di Kantor Wilayah ATR/BPN Yogyakarta, pada tanggal 23 Juni Pukul 08.30 WIB.